



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA MENGATASI TINGGINYA PENGANGGURAN LULUSAN SMK

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Madya
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Per Februari 2024, tingkat pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) mencapai 8,62%, disusul sekolah menengah umum (SMU) sebesar 6,73%, lulusan D4-S3 sebesar 5,63%, dan D1-D3 sebesar 4,87%. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS setidaknya dalam 4 tahun terakhir (2021-2024), lulusan SMK menempati posisi pertama jumlah pengangguran tertinggi. Meskipun selalu menempati posisi pertama, jumlah pengangguran lulusan SMK telah mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2021 turun menjadi 11,45%, Februari 2022 turun menjadi 10,38%, Februari 2023 turun menjadi 9,60%, dan terakhir, Februari 2024 turun menjadi 8,62%.

Penurunan jumlah pengangguran lulusan SMK perlu terus diupayakan, karena pada dasarnya lulusan SMK diharapkan dapat langsung bekerja. Hal ini berbeda dengan pendidikan SMU yang orientasi kelulusannya lebih pada melanjutkan ke perguruan tinggi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Manaker), Ida Fauziah, masih tingginya pengangguran lulusan SMK disebabkan ketidaksesuaian (*mismatch*) dari pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Ketidaksesuaian ini juga dijelaskan oleh pengamat pendidikan vokasi, Farkhan, bahwa jurusan di SMK yang terbanyak saat ini adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta Rekayasa. Sementara itu, jumlah jurusan SMK bidang pertanian hanya 4%, padahal kebutuhan lapangan pekerjaan justru didominasi oleh sektor tersebut sebesar 29,36% (Suskernas BPS, 2023).

Pemerintah telah berupaya mengundang Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Perpres No. 68 Tahun 2022). Khusus bagi kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker), Perpres No. 68 Tahun 2022 menugaskan untuk mengatur dan menyusun Sistem Informasi Pasar Kerja (SKKNI); menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; menyelenggarakan dan membina pelatihan vokasi; menjadi anggota Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, Menaker telah menerbitkan sejumlah keputusan terkait SKKNI. Menaker juga telah menerbitkan Permenaker No. 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja, yang mengatur kewajiban bagi pemberi kerja untuk melaporkan setiap lowongan pekerjaan yang tersedia kepada Kemenaker melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Darwoto, mengungkapkan, Perpres No. 68 Tahun 2022 sudah menjadi koridor yang baik untuk menyelaraskan pasokan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Hanya saja penyelenggara pendidikan terlalu fokus pada keterampilan (*skill*), sehingga pendidikan perilaku (*attitude*) dan pengetahuan (*knowledge*) terabaikan. Padahal perilaku dan pengetahuan berperan penting untuk kematangan cara kerja di Industri sehingga tenaga kerja mudah beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan di sektor industri yang berlangsung cepat.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran lulusan SMK, yaitu sebagai berikut.

1. Mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi permasalahan pengangguran SMK.
2. Mendorong pemerintah mengatasi pengangguran SMK dengan memberikan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri termasuk dengan memperhatikan pendidikan terkait perilaku dan pengetahuan.
3. Mendorong Kemnaker untuk membentuk peraturan terkait penyelenggaraan dan pembinaan pelatihan vokasi dengan memperhatikan tiga kompetensi yang harus dikuasai oleh calon tenaga kerja termasuk lulusan SMK yaitu keterampilan, pengetahuan, dan perilaku.
4. Memastikan agar pemerintah melalui Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dapat meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dalam upaya mengatasi tingginya pengangguran lulusan SMK.

Sumber

antaranews.com, 26 Juni 2024;
cnnindonesia.com, 5 Mei 2023;
kompas.com, 21 Mei 2024; dan
Rakyat Merdeka, 28 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024